

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang penulis lakukan di atas terkait dengan implementasi peraturan daerah Kota Padang nomor 1 tahun 2025 tentang ketenteraman dan ketertiban umum studi kasus di Pantai Purus Kota Padang, maka adapun hasil kesimpulan yang dapat penulis petik yaitu:

- 5.1.1 Keberadaan pengemis di Kota Padang merupakan salah satu wujud nyata dari kemiskinan multidimensi. Mereka sering ditemukan di lokasi-lokasi ramai seperti Pasar Raya, lampu merah yang berada di Jalan Khatib Sulaiman, tempat wisata, serta di kawasan Pantai Purus. Pada tahun 2023-2025 pengemis di Kota Padang semakin meningkat hal ini dikarenakan faktor ekonomi yang rendah, faktor pendidikan, susahny cari pekerjaan, serta faktor kebiasaan karena hasil yang didapatkan mengemis di jalan bisa mencapai tiga ratus ribu rupiah hingga lima ratus ribu rupiah dalam sehari. Adapaun kaitan pengemis dengan ketenteraman dan ketertiban umum yaitu, mengemis dapat menimbulkan ketidaknyamanan masyarakat, yang pada akhirnya dapat mengganggu stabilitas sosial di lingkungan sekitarnya.

- 5.1.2 Implementasi perda Kota Padang nomor 1 tahun 2025 tentang ketenteraman dan ketertiban umum, dalam menangani dan menertibkan pengemis.

Satuan Polisi Pamong Praja turun kelapangan untuk menertibkan pengemis, kemudian akan dibawa ke Dinas Sosial untuk mencari data pengemis tersebut. Ketika datanya ditemukan hanya satu kali ditertibkan, maka akan dibuat perjanjian jika nanti mengulangi mengemis di jalan harus bersedia di rehabilitas. Sedangkan pengemis yang sudah ditertibkan hingga dua sampai tiga kali maka Dinas Sosial akan merehabilitasnya sepuluh hari kedepan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan tentang implementasi peraturan daerah Kota Padang nomor 1 tahun 2025 tentang ketenteraman, dan ketertiban umum maka saran dari penulis sebagai berikut:

- 5.2.1 Keberadaan Pengemis dalam kemiskinan multidimensi Kota padang, alangkah baiknya Pemerintah melakukan analisis pelaksanaan peraturan daerah Kota Padang nomor 1 tahun 2025 khususnya dalam menangani pengemis, serta memeriksa kelapangan bagaimana tindakan yang dilakukan Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menenteramkan dan menertibkan pengemis. Pemerintah Kota Padang juga lebih baik melakukan perencanaan pembangunan panti lansia untuk kedepannya ditingkat Kota bukan hanya tingkat Provinsi saja, agar Dinas Sosial lebih mudah memberikan tempat ketika menertibkan pengemis lansia.
- 5.2.2 Pelaksanaan peraturan daerah Kota Padang nomor 1 tahun 2025 tentang ketenteraman dan ketertiban umum, lebih baik Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penertiban pengemis di Pantai Purus, karena tempat tersebut merupakan wisata yang dikunjungi masyarakat setiap harinya. Tujuan masyarakat berkunjung biasanya untuk menikmati keindahan alam, tetapi dengan adanya pengemis menimbulkan ketidaknyamanan terhadap pengunjung. Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja lebih tegas dalam menangani orang yang mengendalikan pengemis karena hal itu termasuk dalam kategori perdagangan orang, dan sebaiknya masyarakat bekerja sama dengan Pemerintah dengan cara tidak memberi uang kepada pengemis agar tidak mengulangi kebiasaan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Alir, D. (2005). Metodologi penelitian. Jakarta: PT Rajawali Prees.
- Annisa, N. K., Yuniningsih, T., & Dwimawanti, I. H. (2021). Evaluasi Program Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis (GEPENG) di Kabupaten Demak [Universitas Diponegoro]. [https://eprints2.undip.ac.id /id/eprint/ 10935/](https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/10935/)
- Ardiana, W. D. (2020). Evaluasi Program Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis di Daerah Istimewa Yogyakarta. Universitas Gadjah Mada (Doctoral Dissertation).
- Arifin, M. S. (2017). Pengemis dan Penanganannya di Kota Palangka Raya. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya. digilib.iainpalangkaraya.ac.id/889
- Arsyad, L. (2004). Ekonomi Pembangunan Edisi Ke-4. Yogyakarta: Bagian Penerbitan
- Asmara, A. D. (2018). Identifikasi Faktor-Faktor Penyebab Perilaku Merokok the Identification of Smoking Behavior Factors Towards the Students in. Jurnal Riset Mahasiswa Bimbingan Dan Konseling, 4(1), 23-30.
- Asshiddiqie, Jimly, Bahan Orasi Hukum pada acara “Pelantikan DPP IPHI Masa Bakti 2007– 2012”. Bandung, 19 Januari 2008.
- Ayu, S. R. (2017). Tinjauan Sosiologis Terhadap Pengemis yang Mengganggu Ketertiban Umum Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kota Makassar) [UIN Alauddin Makassar]. <https://repository.uinalauddin.ac.id/9472/>
- Bambang Waluyo. (2002). Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika
- Basah, Sjachran, Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi, (Alumni: Bandung, 1985).
- Cahyadi, Antonius dan E. Fernandi M. Manullang, 2010, Pengantar ke Filsafat Hukum, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.

- Carl Joachim Friedrich, 2010, Filsafat Hukum Perspektif Historis, Nusamedia, Bandung,
- Chriswardani Suryawati, "Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional, "dalam Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, (Vol 08/No.03/ September/2005)
- Departemen Sosial Republik Indonesia, Himpunan Pokok-pokok Kebijakan dan program Terpadu Rehabilitas Sosial, Pengemis, Gelandangan dan Orang Tua Terlantar, (Jakarta: Depsos, 1997).
- Diky Septiawan Syah, (2020). "Pelaksanaan Larangan Mengemis Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial" *Skripsi*
- Dinas, Sosial Restra. 2021. Rencana strategis destra: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Dinas Sosial.Padang:yahoo.co.id.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 2010, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Dyah, Lucy. Pengemis dan Gelandangan di Surabaya. Surabaya: Penelitian, 2005.
- Elsye, R. (2021). Kebijakan Pemerintah Bagi Perlindungan dan Keselamatan Masyarakat dari Penularan Covid 19 di Indonesia. Jurnal Kebijakan Pemerintahan, 4(2), 31-37. <https://doi.org/10.33701/jkp.v4i2.1907>
- Eviany, E., & Sutiyo. (2023). Perlindungan Masyarakat (Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Manajemen Kebencanaan). PT. Nas Media Indonesia.
- Febbyola Reflecilia, (2022). "Implementasi Larangan Pengemis Di Depan Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial Di Kota Pekanbaru". *Skripsi*
- Filindra, A., Kaplan, N. J., & Buyuker, B. E. (2022). Beyond Performance: Racial Prejudice and Whites' Mistrust of Government. Political Behavior, 44 (2), 961-979. <https://doi.org/10.1007/s11109-022-09774-6>

- Hagan, Frank E. 2013, Pengantar Kriminologi Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal, Bandung, Prenadamedia Group.
- Handayani, N., Risa Nurmayanti, D., & Nugroho, R. (2021). Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) di Kecamatan Kalijati Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat.
- Harsono, H. (2002). Implementasi Kebijakan dan Politik. Bandung: PT. Mutiara Sumber Widya.
- Haryanto. (2010). Diktat Bahan Kuliah Rehabilitasi dan pekerjaan sosial.pdf. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Hradecký, I. (2007). Homelessness Definition and Typology. In NADEJE o.s. Nadeje o.s.for the Association of Hostels. <https://www.nadeje.cz/img>
- <https://doi.org/10.21009/jpeb.002.2.5Wahyulianti>, M. (2022). <https://journal.student.uny.ac.id/fipbk/article/view/10872>
- Kota Padang. Badan Pusat Statistik 2024. *Jumlah Penduduk Menurut Agama (Jiwa)* Diakses tanggal 23 April 2024, <https://padangkota.bps.go.id/statistics-table/2/MjQxIzI=/jumlah-penduduk.html>
- Kusumaatmadja, Mochtar, Hukum, Masyarakat, Dan Pembinaan Hukum Nasional, (Bandung: Binacipta, 1976).
- Labolo, M. (2016). *UNIMAM BONJOL PADANG*. Literatur IPDN.
- Laurensius Arliman S, "Peranan Filsafat Hukum Dalam Perlindungan Hak Anak Yang Berkelanjutan Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia", Jurnal Hukum Doctrinal, Volume 1, Nomor 2, 2017.
- Lince, L. (2022). Implementasi Kurikulum Merdeka untuk Meningkatkan Motivasi Belajar pada Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan. Prosiding Seminar Nasional Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIM Sinjai, 1, 38–49. <https://doi.org/10.47435/sentikjar.v1i0.829>
- Longdong, Tineke L. 1998, Asas Ketertiban Umum dan Konvensi New York 1958, PT. Citra Aditya Bakti.

- Manan, Bagir, Penegakan Hukum yang Berkeadilan, dalam Menemukan Hukum Suatu Pencarian, Asosiasi Advokat Indonesia, Jakarta, 2009.
- Maratama, K. S. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Pengemis Di Kawasan Pariwisata Kuta Kabupaten Badung Berdasarkan Peraturan Daerah Nomer 7 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat [Universitas Mahasaraswati Denpasar]. <https://eprints.unmas.ac.id/id/eprint/808/>
- Mart, P., De-pablos-heredero, C., & Montes, J. L. (2022). Impact of Dynamic Capabilities on Customer Satisfaction through Digital Transformation in the Automotive Sector.Sustainability. <https://doi.org/10.3390/su14084772>
- Mertokusumo, Sudikno dan A. Pitlo, Bab-bab tentang Penemuan Hukum, (Yogyakarta:Citra Adtya Bakti, 1993)
- Mudrajad Kuncoro, Ekonomika Pembangunan, Teori, Masalah dan kebijakan, (Yogyakarta: YKPN, 2002)
- Muhajir, Noeng. Metodologi Penelitian Kualitatif, cet I Yogyakarta, 2000
- Musabayana, G. T., Mutambara, E., & Ngwenya, T. (2022). An empirical assessment of how the government policies influenced the performance of the SMEs in Zimbabwe. Jo urnal of Innovation and Entrepreneurship. <https://doi.org/10.1186/s13731-021-00192-2>
- Naim, H. (2022). Pemberlakuan larangan memberi uang kepada pengemis dalam Perda Pati Nomor 7 tahun 2018 ditinjau dari Hukum Islam [IAIN KUDUS]. <http://repository.iainkudus.ac.id/9391/>
- Nalle, Victor Imanuel W. "Studi Sosio-Legal Terhadap Ketertiban dan Ketentraman di Kabupaten Sidoarjo." Jurnal Hukum & Pembangunan 47.3 (2016): 233-22.
- Nelya, B., & Sihombing, J. P. (2020). Peranan Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Tunawisma Dan Pengemis Di Sumatera Utara. Jurnal Governance Opinion, 5(1), 21–29.

- Nirman Kasim, "KEHIDUPAN PENGEMIS" (Studi Kasus Kehidupan Pengemis Kabupaten Gorontalo)".(Online),(<https://pdfs.semanticscholar.org/f4ba/84ad92b4a6d1536f19db67a0af7873d54385.pdf>, 2015), 2015.
- Nugrahani, F. (2008). Metode Penelitian Kualitatif (Vol. 1, Issue 1). <http://ejournal.usd.ac.id/index.php>
- Nurkholis, H., Dirnanudin, D., & Handayani, R. (2017). Implementasi Perda Kota Serang No. 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan Dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat (Studi kasus Gelandangan dan Pengemis di Kota Serang) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa]. <https://eprints.untirta.ac.id/1293/>
- Padang, Pemerintah dinas sosial 2025. <https://dinas.sosial-padang.go.id/>. Diakses tanggal 26 april 2025.
- Padang, Pemerintah Kota. 2024. <https://dinsosnakerpadang.com/kontak/>. https://ppid.padang.go.id/public/document/informasi/uploads/audios/ppid_padang_2024_1709522364.pdf
- Pasaribu, C. I. C. (2022). Kolaborasi Satuan Polisi Pamong Praja Dengan Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Gelandangan Dan Pengemis Di Kabupaten Kotawaringin Timur [Institut Pemerintahan Dalam Negeri]. <http://eprints.ipdn.ac.id/11245/>
- Perkumpulan Prakarsa. 2015. Modul Pelatihan Perhitungan MPI Indonesia dan Penyusunan Laporan MPI Indonesia. Jakarta: Prakarsa
- Pragita, F. (2021). Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Pemenuhan Hak Kesehatan Bagi Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Tegal [Universitas Islam Indonesia]. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/14964>
- Pramono, Budi, 2012, Kompetensi Mengadili Tindak Pidana Umum Yang Dilakukan Oleh Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Surabaya, Untag Press (Disertasi).

- Purwono. (2008). Studi Kepustakaan. Info Persada, 6(2).
[https://ejournal.usd.ac.id/index.php/Info Per Jurnal Tatapamong 5](https://ejournal.usd.ac.id/index.php/Info%20Persada)
 (2), September 2023: 145-161
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2005, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta
- Puspa, Yan Pramadya. Kamus Hukum. Semarang: Aneka Ilmu 1977.
- Putra, I. A. (2014). Peranan Dinas Sosial Dalam Pembinaan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Pekanbaru. Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Putri, G. D. (2021). Analisis Program Pembinaan Gelandangan Dan Pengemis (Gepeng) Pada Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
- Raco, J.R. (2010). Metode Penelitian Kualitatif, Jakarta: PT. Grasindo
- Rahardjo, Satjipto, Masalah Penegakan Hukum suatu Tinjauan Sosiologis, (Bandung: Sinar Baru, Tanpa Tahun)
- Rahmadanita, A. (2019). PEMBINAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM: (Studi Kasus Gelandangan dan Pengemis). Jurnal Tatapamong, 1, 95-104.
<https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v1i2.1154>
- Rauf, Rahyunis, 2005. Kelembagaan RT dan RT (Sejarah, Hakekat & Propsek Kelembagaan). Pemerintah Kota Pekanbaru. Riau
- Reksodiputro, Mardjono, Komisi Yudisial: Wewenang Dalam Rangka Menegakkan Kehormatan Dan Keluhuran Martabat Serta Menjaga Perilaku Hakim Di Indonesia, dalam Bunga Rampai Refleksi Satu Tahun Komisi Yudisial Republik Indonesia, (Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2006).
- Rohmaniyati, R. (2016). Pemberdayaan Gelandangan Dan Pengemis (Gepeng) Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Di Lembaga Sosial Hafara Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Jurnal Pendidikan Luar Sekolah, 1-15.

- Saadah, M., Prasetyo, Y. C., & Rahmayati, G. T. (2022). Strategi Dalam Menjaga Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif. *Al-'Adad: Jurnal Tadris Matematika*, 1(2), 54–64. <https://doi.org/10.24260/add.v1i2.1113>
- Sari, D. Y., & Bakar, A. A. (2020). Efektifitas Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis Di Kabupaten Tulungagung (Studi di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung). *Jurnal Mediasosian: Jurnal Ilmu Sosial Dan Administrasi Negara*, 4(1), 63–76. <https://doi.org/10.30737/mediasosian.v4i1.821Swaramarinda>,
- Setiadi, Wicipto. 2010. <http://www.solusihukum.com/artikel/artikel49.php>
- Setiawan, G. (2004). Implementasi dalam birokrasi pembangunan. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.
- Shinohara, S. (2023). Bad government performance and citizens' perceptions : A quasi-experimental study of local financial crisis. *International Review of Administrative Sciences*. <https://doi.org/10.1177/00208523211067085>
- Sianturi, S.R. 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Babinkum TNI.
- Soekanto, Soerjono, 1988, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono, *Putusan-putusan yang Mempengaruhi Tegaknya Hukum*, (Jakarta: BPHN, 1983.
- Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum Universitas Indonesia* Jakarta: UII Press
- Soerjono Soekanto. 2003, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Sumantri, H., Pikri, F., & Lubis, M. A. (2018). Efektivitas Program Rehabilitasi Sosial Terhadap Gelandangan Dan Pengemis Di Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya Cisarua. *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 10(1). https://etheses.uinsgd.ac.id/68760/1/18_-liSumantri-Ind.pdf

- Suradinata, E. (2013). Etika Pemerintahan dan Geopolitik Indonesia. Pustaka Ramadhan.
- Susiati, S., Masniati, A., Iye, R., & Buton, L. H. (2020). Kearifan Lokal Dalam Perilaku Sosial Remaja Di Desa Waimiting Kabupaten Buru. Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton, 7(1), 8–23. <https://doi.org/10.35326/pencerah.v7i1.747>
- Swaramarinda, D. R. (2014). Analisis Dampak Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Dki Jakarta. Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis (JPEB), 2(2), 63.
- Syahputra, A. S., & Saputra, A. (2020). Pola Perilaku Tunawisma Saat Bermalam Di Ruang Publik Kota Surakarta. SIAR 2020: Seminar Ilmiah Arsitektur|. <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/xmlui/bitstream/handle/11617/12041/4.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Syed Agung Afandi, M. A. (2022). Pengantar Teori Pembangunan. Yogyakarta: Bintang Semesta Media Yogyakarta.
- Umar, F. (2017). Peran Dinas Sosial Dalam peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia (Lansia) Terlantar di Kota Bandar Lampung. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
- Usman, N. (2002). Konteks implementasi berbasis kurikulum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Wasonowati, R. R. T., Redjeki, T., & Ariani, S. R. D. (2014). Penerapan Model Problem Based Learning (PBL) Pada Pembelajaran Hukum – Hukum Dasar Kimia Ditinjau Dari Aktivitas Dan Hasil Belajar Siswa Kelas X Ipa SMA Negeri 2 Surakarta Tahun Pelajaran 2013/2014. Jurnal Pendidikan Kimia, 3(3), 66–75. <https://jurnal.fkip.uns.ac.id/index.php/kimia/article/view/4244>
- Wu, Y., & Tham, J. (2023). The Impact of Executive Green Incentives and Top Management Team Characteristics on Corporate Value in China: The Mediating Role of Environment, Social and Government Performance.

Sustainability, 1–23. <https://doi.org/10.3390/su151612518>

Wulandari, S., & Widowati, A. (2023).

Zed, M. (2004). Metode Penelitian Kepustakaan. Yayasan Obor Indonesia.

Zulkifly, Z. A., Brasit, N., Alhaqqi, M. S., & Adelia, S. (2022). Analisis Peningkatan Kualitas Layanan Mobile Banking dengan Pendekatan Metode E-Servqual. JBMI (Jurnal Bisnis, Manajemen, dan Informatika), 19(1), 61–79. <https://doi.org/10.26487/jbmi.v19i1.21337>

